

Analisis Pengalokasian Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Kota Samarinda pada APBD Provinsi Kalimantan Timur

Aji Muhammad Mirman Deni Pratama^{1*}, Zainal Abidin², and Diana Lestari³

^{1,2,3}Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

*Correspondence author: ajim2dp@gmail.com Telp: +628XXXXXXXXXX

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeksripsikan Analisis Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Kota Samarinda pada APBD Provinsi Kalimantan Timur, serta mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam Analisis Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Kota Samarinda pada APBD Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian kualitatif, metode penelitian menggunakan wawancara mendalam dan triangulasi untuk analisis data. Sumber data dari *Key Informan* dan informan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus penelitian yang dianalisis meliputi aspek informasi, aspek sumber daya manusia, aspek birokrasi keseluruhan faktor tersebut merupakan pendukung dan penghambat dalam Analisis Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Kota Samarinda pada APBD Provinsi Kalimantan Timur. Sepenuhnya faktor tersebut sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti kurang lengkapnya melengkapi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur No 49 Tahun 2020 seperti tidak lengkapnya data siswa, fisik bangunan, DED (detail engineering desain), RAB (rencana anggaran biaya), dan status lahan.

Kata Kunci: aspek birokrasi; aspek komunikasi; aspek sumber daya manusia; bantuan keuangan; pendidikan

1. Pendahuluan

Anggaran negara yang dirancang dalam satu periode oleh pemerintah digunakan oleh berbagai instansi pemerintahan untuk menunjang keseluruhan program yang telah direncanakan oleh setiap instansi pemerintahan. Salah satu instansi yang menggunakan anggaran negara adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, anggaran ini bertujuan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan komunikasi dan sosialisasi pada masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan-kegiatannya, Pemerintah Kabupaten/Kota sering terkendala anggaran sehingga pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 menyebutkan bahwa salah satu sumber keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bantuan keuangan adalah belanja bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang sifat bantuannya diarahkan oleh Pemerintah Provinsi yang terdiri dari belanja bantuan spesifik dan non spesifik. Bantuan keuangan bersifat spesifik merupakan penyaluran belanja bantuan keuangan yang kegiatannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur sementara belanja bantuan keuangan bersifat non spesifik adalah penyaluran belanja bantuan keuangan yang kegiatannya dilaksanakan selain keputusan Gubernur.

Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Gubernur No 49 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan pengaturan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan agar langkah-langkah pemberian, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan,

pertanggungjawaban dan pelaporan belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan tertib, terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi bersifat sebagai pendorong dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan dan mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah serta pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota. Pemberian Bantuan Keuangan yang diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dan dialokasi melalui mekanisme pembahasan APBD Provinsi.

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Permendagri No. 38 Tahun 2018, "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut". Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Anggaran merupakan rencana aktifitas bisnis perusahaan jangka pendek, biasanya 12 bulan yang meliputi pengkoordinasian secara rinci rencana operasi perusahaan yang diharapkan selama periode yang dianggarkan. Rencana operasi perusahaan meliputi rencana atau target penjualan, beban-beban, penerimaan dan pengeluaran kas, laba bersih, posisi kas, neraca, dan tujuan-tujuan lain yang ditentukan manajemen. Sementara dalam hal periode anggaran mungkin meliputi bulanan, kuartalan, atau tahunan. Anggaran ini kadang disebut juga sebagai laporan keuangan (Andriana, 2008).

Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos pendapatan, belanja, transfer, surplus, dan defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan bersih, dan sisa lebih-kurang pembiayaan anggaran (Andayani, 2006).

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas (Rambe, 2016). Sedangkan menurut Sudaryo (2017) belanja diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset langsung yang memberi manfaat lebih dari satu periode.

2. Metode

Sesuai dengan metode dan fokus penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri data primer dan sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

Data Primer, sesuai dengan metode dan fokus penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini yaitu pada data primer yang diperoleh dari *Key Informan* dan informan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) *Key Informan* (informan utama) yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur. *Key Informan* merupakan orang yang lebih mengetahui dan memahami analisis pengalokasian bantuan keuangan Kota Samarinda pada APBD Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Informan terdiri dari pegawai atau staf di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, serta masyarakat di Kota Samarinda selaku penerima bantuan keuangan. Dalam menentukan informan menggunakan teknik random sampling. Riduwan (2014) mengatakan "random sampling adalah penentuan sampel berdasarkan secara acak". Jumlah informan dari 2 orang pegawai dan masyarakat sebanyak 2 orang.

Tahap akhir tentang analisis pengalokasian bantuan keuangan Kabupaten/Kota pada APBD

Provinsi Kalimantan Timur dengan menyimpulkan hasil pencapaian sasaran pembangunan daerah. Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka penelitian menggunakan modul interaktif berdasarkan pendapat Miles dan Huberman.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, melalui analisis triangulasi, maka dilakukan wawancara mendalam kepada narasumber dalam penelitian ini, yang terbagi dalam 3 kategori yaitu wawancara kepada *Key Informan*, wawancara kepada informan dengan pegawai di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

3. Hasil Penelitian

Uraian fokus dari setiap pendapat informan berikut:

Tabel 1. Perbandingan pendapat informan mengenai aspek dalam bantuan keuangan bidang pendidikan

Informan	Fokus Penelitian (Aspek)			
	Komunikasi	Sumber Daya	Birokrasi	Pendukung Penghambat
I	Komunikasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi mengenai bantuan keuangan pendidikan sudah cukup baik karena komunikasi cara kita memberikan penyampaian informasi mengenai bantuan keuangan, agar tidak terjadi miskomunikasi informasi, karena semuanya kan memiliki perbedaan pemahaman mengenai informasi yang disampaikan	Dengan adanya bantuan keuangan akan membantu sumber daya manusia yang memadai. Dengan optimalnya sumber daya manusia maka akan mendukung dan meningkatkan kualitas Pendidikan	Pemerintah itu sudah terlibat langsung mengurus bantuan keuangan dengan adanya bantuan keuangan ini kan bertujuan untuk memberikan pelayanan dan membantu keperluan sekolah seperti infrastruktur dan fasilitas sekolah, supaya birokrasi berjalan lancar itu maka harus didukung dengan memberikan kontribusi yang baik dalam keberlangsungan dan keberlanjutan Pendidikan, sekaligus mendukung terwujudnya visi misi kita	Faktor pendukung bantuan keuangan bidang pendidikan ini perlu melengkapi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur No 49 Tahun 2020 seperti fisik bangunan, DED (detail engineering desain), RAB (rencana anggaran biaya), status lahan. Faktor penghambat bantuan keuangan di bidang pendidikan ini masih banyak sekolah yang tidak melengkapi persyaratan, belum lengkapnya data fisik bangunan, DED (detail

Informan	Fokus Penelitian (Aspek)			
	Komunikasi	Sumber Daya	Birokrasi	Pendukung Penghambat
II	Komunikasi dari pemerintah untuk bantuan keuangan sudah baik, dari penyampaian juga mengenai informasi bantuan keuangan sudah cukup berjalan dengan baik	Bantuan keuangan pastinya sangat membantu pada peningkatan sumber daya manusia, perlu didukung pendidikan ini melalui bantuan keuangan agar bisa menyerap penerimaan tenaga pendidik yang baru	Dinas pendidikan kan sudah memberikan bantuan keuangan ke sekolah-sekolah yang memberikan data lengkap kepada kami pemerintah, untuk diberikan bantuan keuangan ya datanya harus lengkap itu untuk mempermudah dan mempercepat alur pemberian bantuan	engineering desain), RAB (rencana anggaran biaya), status lahan Faktor-faktor yang menghambat bantuan keuangan bidang pendidikan ini yaitu masih banyak sekolah-sekolah yang datanya kurang lengkap yang menjadi penghambat pemberian bantuan keuangan, untuk itu perlu dilengkapi data-data lengkap sekolah dalam memberikan data siswa dan lain-lain. Faktor pendukung pada bantuan keuangan bidang pendidikan ini perlu melengkapi data-data yang diperlukan agar mempermudah pemberian bantuan keuangan bidang pendidikan
III	Menurut saya, komunikasi dari pemerintah untuk bantuan keuangan ya sudah cukup baik karena komunikasi kan bisa memberikan informasi juga	sumber daya manusia untuk tenaga pendidikan ini sudah memadai sih, dengan bantuan keuangan ini	-	-

Informan	Fokus Penelitian (Aspek)			
	Komunikasi	Sumber Daya	Birokrasi	Pendukung Penghambat
	mengenai bantuan keuangan, karena dari komunikasi itu juga memberikan informasi yang menjadi akurat dan dapat dipahami.	bisa membantulah untuk tenaga pendidikan dan bisa juga membantu untuk pelatihan atau bimtek tenaga pendidik		
IV	Komunikasi kan bisa memberitahukan kita tentang bantuan keuangan, dari pemerintah kepada sekolah-sekolah juga bisa diterima baik karena dapat dipahami oleh sekolah-sekolah yang menerima bantuan keuangan jadi harus bisa pemerintah itu memberikan informasi yang baik	untuk saat ini ya banyak tenaga pendidik dibutuhkan untuk sekolah-sekolah dengan adanya bantuan keuangan setidaknya bisa lah untuk membantu sumber daya manusia di sekolah	-	-

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara penelitian

Berdasarkan uraian tabel tersebut disimpulkan bahwa dari aspek yang diteliti yaitu: informasi, sumber daya, dan struktur birokrasi serta faktor pendukung dan penghambat, bagi setiap informan dalam penelitian ini masing-masing memiliki pendapat dalam menilai optimalisasi bantuan keuangan Pendidikan.

Berkaitan dengan aspek komunikasi pemerintah dalam melakukan pemberian bantuan keuangan melalui aspek komunikasi, sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah yang memberikan penyaluran bantuan keuangan pendidikan, semua informan mengatakan bahwa informasi dari pemerintah cukup baik, informasi diterapkan ke penerimaan bantuan keuangan pendidikan, hanya saja belum sepenuhnya maksimal karena ada beberapa daerah yang belum dijangkau dalam hal pemberian bantuan keuangan pendidikan. Namun penilaian sekolah merasa puas dalam pemberian bantuan keuangan pendidikan, mereka dapat memahami dengan baik tentang informasi pemberian bantuan keuangan Pendidikan.

Aspek sumber daya manusia untuk sekolah sepenuhnya sangat mendukung dan memadai, karena sumber daya manusia sangat diperlukan sekolah untuk peningkatan. Adapun dari sumber daya manusia sudah sepenuhnya memberikan kualitas pendidikan yang baik.

Aspek birokrasi juga sepenuhnya sudah diterapkan oleh pemerintah, semua informan mengatakan bahwa birokrasi yang berjalan sudah baik, dari semua aspek tersebut merupakan faktor pendukung dalam memberikan bantuan keuangan bidang pendidikan.

4. Pembahasan

Pada penelitian ini dengan judul Analisis Pengalokasian Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Kota Samarinda Pada APBD Provinsi Kalimantan Timur, peneliti menggunakan analisis Huberman

untuk mendeskripsikan beberapa fokus penelitian yang telah ditentukan berdasarkan teori yang mendukung serta faktor penghambat yang dihadapi bantuan keuangan bidang pendidikan, adapun uraian pembahasan sebagai berikut:

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dalam Aspek Komunikasi

Komunikasi memberikan informasi kesemua pihak yang terkait dengan program yang akan dilakukan, kesalahan dalam memahami informasi akan mengakibatkan perbedaan persepsi, sehingga menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan bantuan keuangan bidang pendidikan.

Menurut Edward yang dikutip oleh Abdullah (2012) bahwa perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan dan juga bagi masyarakat yang melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu konsistensi juga harus mendapat perhatian dalam sebuah komunikasi. Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan.

Menurut Agustino (2009) penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sesuai dengan pendapat Edwards dalam Winarno (2014:79) bahwa: "Ada beberapa hambatan yang timbul mentransmisikan perintah-perintah peran kebijakan, pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, kedua informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi, ketiga, penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmampuan pada persyaratan-persyaratan suatu kebijakan"

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa komunikasi sudah terbangun dengan baik. komunikasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi mengenai bantuan keuangan pendidikan sudah cukup baik karena komunikasi ini cara kita memberikan penyampaian informasi mengenai bantuan keuangan di bidang pendidikan agar tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahan dalam penyampaian informasi.

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dalam Aspek Sumber Daya Manusia

Faktor aspek sumber daya manusia yang mendukung akan memberikan dampak yang maksimal dalam kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Menurut Conyers (1990) bahwa harus realistis dalam hal sumber daya yang ada untuk penerapan kebijakan guna mendukung tercapainya suatu rencana". Dengan demikian sumber daya menjadi sangat penting. Widodo (2012), menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Setiap program atau peran yang dilaksanakan yang dijalankan sangat memerlukan dukungan anggaran maupun staf dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan memonitoring program kesemuanya itu membutuhkan biaya selanjutnya. Seperti apa yang diungkapkan oleh Widodo (2012), terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa bantuan keuangan bidang pendidikan ini sangat membantu pada peningkatan sumber daya manusia yang memadai, dengan dukungan bantuan keuangan bidang pendidikan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dalam Aspek Birokrasi

Aspek birokrasi berkaitan dengan karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam bantuan keuangan bidang pendidikan mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Apabila sumber daya manusia memadai untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, maka kebijakan setidaknya dapat dikatakan telah berjalan dengan baik.

Sesuai dengan pendapat tersebut birokrasi yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah menerapkan sistem birokrasi yang baik, bersikap netral dalam setiap pelaksanaan.

Peran birokrasi dalam menjalankan peran dalam proses birokrasi dalam implementasi kebijakan

publik, maka struktur birokrasi sangat penting di dalam implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan uraian dan analisis dari fokus penelitian disimpulkan bahwa pemerintah terlibat langsung mengenai bantuan keuangan di bidang pendidikan, dengan adanya bantuan keuangan di bidang Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan membantu keperluan sekolah seperti infrastruktur dan fasilitas sekolah, agar sistem birokrasi berjalan lancar maka harus didukung dengan memberikan kontribusi yang baik dalam keberlangsungan dan keberlanjutan pendidikan sekaligus mendukung terwujudnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang bermutu. Pemerintah sudah memberikan bantuan keuangan bidang pendidikan yang bisa diberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang memberikan data lengkap kepada pemerintah untuk diberikan bantuan keuangan bidang pendidikan, dengan data yang lengkap akan mempermudah dan mempercepat alur pemberian bantuan keuangan bidang pendidikan.

Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan

Berdasarkan hasil temuan melalui wawancara penelitian dalam kaitannya dengan bantuan keuangan bidang pendidikan, terdapat beberapa pendukung dan penghambat dalam bantuan keuangan bidang pendidikan, yaitu:

- 1) Faktor pendukung bantuan keuangan bidang pendidikan ini perlu melengkapi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur No 49 Tahun 2020 seperti fisik bangunan, DED (detail engineering desain), RAB (rencana anggaran biaya), status lahan. Faktor penghambat bantuan keuangan di bidang pendidikan ini masih banyak sekolah yang tidak melengkapi persyaratan, belum lengkapnya data fisik bangunan, DED (detail engineering desain), RAB (rencana anggaran biaya), status lahan.
- 2) Faktor-faktor yang menghambat bantuan keuangan bidang pendidikan ini yaitu masih banyak sekolah-sekolah yang datanya kurang lengkap yang menjadi penghambat pemberian bantuan keuangan, untuk itu perlu dilengkapi data-data lengkap sekolah dalam memberikan data siswa dan lain-lain. Faktor pendukung pada bantuan keuangan bidang pendidikan ini perlu melengkapi data-data yang diperlukan agar mempermudah pemberian bantuan keuangan bidang pendidikan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Analisis Pengalokasian Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Kota Samarinda Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Komunikasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi mengenai bantuan keuangan pendidikan sudah cukup baik karena komunikasi bisa memberikan penyampaian informasi agar tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahan dalam penyampaian informasi.
- 2) Bantuan keuangan bidang pendidikan ini sangat membantu pada peningkatan sumber daya manusia yang memadai, dengan dukungan bantuan keuangan bidang pendidikan ini dapat meningkatkan kualitas Pendidikan.
- 3) Kelengkapan data yang diperlukan bidang pendidikan untuk pemberian bantuan keuangan ini bisa menjadi terobosan dalam penyampaian informasi dan pemahaman dalam proses pemberian bantuan keuangan.

6. Daftar Pustaka

- Abdullah, R. 2012. Pembelajaran berbasis pemanfaatan sumber belajar. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 12(2).
- Agustino, L. 2009. *Pilkada dan dinamika politik lokal*. Pustaka Pelajar.
- Atmini, S., & Andayani, W. 2006. Manfaat laba dan arus kas untuk memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan textile mill products dan apparel and other textile products yang terdaftar di bursa efek jakarta. *TEMA*, 7(2).
- Conyers, R. A., Bais, R., & Rofe, A. M. 1990. The relation of clinical catastrophes, endogenous oxalate production, and urolithiasis. *Clinical chemistry*, 36(10), 1717-1730.
- Hermawan, D., Widodo, S., & Mulyadi, E. 2012. *Sistem Panas Bumi Daerah Candi Umbul-Telomoyo*

- Berdasarkan Kajian Geologi Dan Geokimia. Buletin Sumber Daya Geologi, 7(1), 1-6.
- Martin, E., & Winarno, B. 2014. Peran Faktor Demografi dalam Pengembangan Hutan Kota di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(1), 91-103.
- Permendagri No. 38 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 49 tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Keuangan.
- Pimmer, C., & Rambe, P. 2016. The educational role of mobile instant messaging. Findings from a systematic review. *New Trends and Issue Proceedings on Humanities and Social Sciences*, 11, 153-161.
- Riduwan, A. K. H. M. A. D. 2014. Tanggungjawab Lingkungan Dan Peran Informasi Biaya Lingkungan Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen: Studi Kualitatif. *Nas. Akunt*, 14, 26.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N. A., & Bandung, S. I. 2021. *Keuangan di era otonomi daerah*. Penerbit Andi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah.